

Jurnal

ISSN 977-2722-7227

Widya



Vol. 29, Juni 2023

Mengasah Ilmu, Menambah Wawasan, Menuju Profesional



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139
Telp (0711) 440646, 441792 Fax (0711) 445626



**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139
Telp (0711) 440646, 441792 Fax (0711) 445626

JURNAL WIDYA

Vol. 29, Juni 2023

ISSN 977-2722-7227

SUSUNAN PENGURUS**Pelindung/ Penasehat**

Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
Provinsi Sumatera Selatan

Penanggung Jawab

Dr. Drs.H.Mudasir, M.Si,MPd

Editor

Drs.H.M Nasir Nata, SH MH

Dr. Drs.H.Mudasir, M.Si,MPd

Dra. Efrilia, M.Si.

Dra. Ratna Hustati, M.Si

Oktavianus Tampubolon, SH.,MH

Mery Fanada, S.Pd,SKM, M.Kes

Mitra Bastari

Prof. Dr. Abdullah Idi, M.Ed

Prof. Dr. Didik Susatyo, M.Si.

Prof. Dr. Indawan, M.Pd

Dr. Andries Lionardo, S.IP, M.Si.

Dr. Sri Sulastri, SH.M.Si

Staf/ Sekretariat

Dra.Sugiastuti, SS MM

Ir. Ibrahim Hamid, M.Eng

Holijah, SH, MH

Dra. Srisnawati, M.Si

Drs. Sutralhis, M.Si

**BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Jl. Putri Kembang Dadar No 77 Bukit Besar Palembang Kode Pos 30139

Telp. (0711) 440646, 441792 Fax (0711) 445626



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
Jl. Putri Kembang Dadar No. 77 Bukit Besar Telp.0711-440646 Fax 0711-445626
P A L E M B A N G

KATA PENGANTAR

KEPALA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Bersama Kepala Lembaga Administrasi Negara dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 22 tahun 2014 dan Nomor 8 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Widyaiswara dan Angka kreditnya, diantaranya ditegaskan bahwa kegiatan Widyaiswara adalah : “ *Membuat karya tulis ilmiah, Penyusunan Bahan Ajar/ Materi Pendukung Modul*”. Sehubungan dengan hal tsb. maka saya menyambut baik atas diterbitkannya : “**JURNAL WIDYA**”.

Jurnal ini kami sambut dan kami hargai, mengingat di satu sisi akan memperkaya wawasan bagi yang bersangkutan dan juga akan menambah kontribusi pengetahuan bagi peserta Diklat. Oleh karena itu Jurnal Widya tersebut dapat dijadikan bahan bacaan bagi yang memerlukannya terutama yang bersangkutan.

Usaha dan Karya semacam ini kiranya dapat dilakukan secara berkesinambungan sesuai dengan perkembangan iptek, sehingga dapat meningkatkan kualitas dan ketajaman pola pikir yang rasional serta profesional.

Demikian, mudah-mudahan Jurnal ini ada manfaatnya.

Palembang, Juni 2023

KEPALA BPSDMD
PROV.SUM.SELATAN

Hj. Tarbiyah, S.Pd., M.M
NIP. 196410131984062001
Pembina Utama Madya /IVD

KATA PENGANTAR

Jurnal Widya merupakan karya tulis ilmiah dari hasil suatu penelitian di sajikan untuk memenuhi atau sebagai kegiatan profesi para widyaiswara di Provinsi Sumatera Selatan pada umumnya dan widyaiswara Indonesia pada umumnya. Jurnal Widya ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Materi Jurnal ini berisikan uraian-uraian singkat dari hasil pengkajian tentang pelayanan public, Administrasi public, kebijakan public, analisis diklat, dan lain lain, yang telah di susun dan sunting dari berbagai literatur, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu harapan saya kiranya dapat diterima sesuai dengan harapan kita bersama.

Kepada para Widyaiswara kami sebagai pengurus jurnal berharap kiranya ada tindak lanjut / berkesinambungan dalam melaksanakan kegiatan ini, minimal tiga bulan sekali dapat diterbitkan. Disamping itu kritik dan saran yang sifatnya membangun, tim redaksi akan terima dengan segala senang hati.

Palembang, Juni 2023

Redaksi

DAFTAR ISI

	Halaman
STRATEGI PENCEGAHAAN KORUPSI DI INDONESIA Hariyati	7-12
PROGRAM PELKSANAAN KAPASITAS SUMBERDAYA APARATUR DISEKRETARIAT DERAH KAB. MUBA. Mudasir	13-32
STRATEGI MANAJEMN PERPUSTAKAAN DALAM PERSIAPAN AKREDITASI Sugiasuti	33-40
IMPLEMENTASI BELA NEGARA MELALUI PARTISIPASI MASYARAKAT DESA DI KECAMATAN AIR KUMBANG KAB. BANYUASIN Tri Yusnani	41-54
TINJAUAN PUSTAKA POKOK-POKOK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA PERSPEKTIF KEWENANGAN DESA, PENATAAN DESA DAN KELEMBAGAAN DESA Roni Abu Hasan	55-87

STRATEGI MANAJEMEN PERPUSTAKAAN DALAM PERSIAPAN AKREDITASI

Sugiasuti

(Widyaiswara Ahli Utama BPSDMD Prov.Sumsel,.e-mail: sugiasuti63@gmail.com

HP. 081368623276)

Diterima 2 Maret 2023, disetujui 8 juni 2023

ABSTRAK

Belum menyeluruhnya dilakukan "*profiling*" (akreditasi perpustakaan) kepada setiap lembaga perpustakaan sesuai jenisnya. Mengingat posisi perpustakaan strategis, diharapkan perhatian Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dalam meningkatkan motivasi lembaga perpustakaan, maka setiap lembaga/institusi perpustakaan pemerintah (jenis perpustakaan khusus/instansi) memenuhi standar minimal, sertas harus juga diakreditasi. Tujuan penulisan ini adalah agar keberadaan lembaga perpustakaan harus memenuhi komponen layanan, kerjasama, koleksi, pengolahan bahan pustaka, sumber daya manusia (SDM), gedung/sarana, anggaran, dan manajemen perpustakaan. Metode yang digunakan adalah observasi lapangan dan tinjauan pustaka. Diharapkan berdasar PP 36 Tahun 2007 perpustakaan adalah sebagai urusan wajib. Lembaga berupaya mewujudkan masyarakat berbasis IPTEK, mengkondisikan adanya masyarakat suka membaca (*reading habit*), tumbuh menjadi masyarakat belajar (*learning society*). Akreditasi mempersiapkan dan melengkapi unsur-unsur yang termasuk dalam kriteria penilaian, seperti

Kata Kunci: Perpustakaan, Akreditasi.

I. PENDAHULUAN

Masih banyaknya perpustakaan khusus dan instansi yang belum dikelola dengan baik, sehingga pemanfaatannya belum optimal. Ketidak tertarikannya suasana perpustakaan khusus dan instansi membuat kesulitan untuk memotivasi pengguna perpustakaan dalam minat baca, apalagi menuju standarisasi sebagai wadah perpustakaan jauh dari ketentuan minimal yang harus dipenuhi, berdasar PP 36 Tahun 2007, agar berupaya mewujudkan masyarakat berbasis IPTEK, mengkondisikan adanya masyarakat suka membaca (*reading habit*), tumbuh menjadi masyarakat belajar (*learning Society*).

Selanjutnya untuk terkondinya hal tersebut di atas, sebagaimana berdasar PP 36 Tahun 2007 perpustakaan adalah sebagai urusan wajib, tentunya harus mendapat perhatian yang sangat besar dari Pemerintah. Setiap lembaga/ institusi perpustakaan pemerintah (jenis Perpustakaan khusus/ instansi) baik yang berada pada wilayah Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten dan Kota. Selanjutnya Perpustakaan Nasional RI, menyampaikan bahwa: "Setiap lembaga perpustakaan sesuai jenisnya, akan dilakukan *"Profiling"* (Akreditasi Perpustakaan).

A. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Perpustakaan Unit Pelaksana Daerah (OPD) memenuhi syarat minimal sebagai wadah perpustakaan;
2. Bagaimana pembina koleksi di Perpustakaan Lembaga OPD;
3. Bagaimana pengorganisasian perpustakaan OPD;
4. Bagaimana pengadaan dan penganggaran di perpustakaan OPD;
5. Bagaimanakah prosedur akreditasi lembaga perpustakaan di OPD.

Dari identifikasi masalah-masalah tersebut di atas maka masalah dibatasi pada: "Bagaimanakah manajemen suatu perpustakaan dalam persiapan akreditasi?".

B. Tujuan

Sesuai amanah UU no. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, pasal 4. bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada Pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Meningkatkan motivasi lembaga perpustakaan, Lembaga berupaya mewujudkan masyarakat berbasis IPTEK. Untuk tujuan tersebut "terpenuhinya standarisasi suatu perpustakaan".

C. Manfaat Penulisan

Penulisan jurnal ini diharapkan dapat menjawab beberapa

permasalahan yang berkenaan dengan standarisasi suatu perpustakaan yang berada pada suatu OPD, pembinaan koleksi, pengorganisasian, pengadaan dan penganggaran, prosedur akreditasi Perpustakaan OPD.

1. Manfaat secara teoritis

Penulisan jurnal ini diharapkan berguna dalam menambah khazanah keilmuan, yang antara lain meliputi standarisasi suatu perpustakaan, yang memenuhi syarat minimal, pembinaan perpustakaan, pengorganisasian perpustakaan, pengadaan dan penganggaran, dan prosedur akreditasi perpustakaan OPD.

2. Manfaat Secara Praktis

Manfaat secara praktis yang dimaksud adalah berupa implementasi kajian konsep perpustakaan yang memenuhi syarat minimal, pembinaan perpustakaan, pengorganisasian perpustakaan, pengadaan dan penganggaran, prosedur akreditasi.

D. Sasaran

Agar perpustakaan khusus atau instansi dapat mempersiapkan diri dalam mengkondisikan standarisasi keberadaan perpustakaan sebagai wadah perpustakaan baik jenis Perpustakaan khusus/ instansi yang terakreditasi.

E. Ruang Lingkup Bahasan

Adapun untuk mengkondisikan

keberadaan perpustakaan khusus atau instansi yang terakreditasi, artinya wadah perpustakaan yang memenuhi standarisasi dan siap untuk diakreditasi. Dalam persiapan diri untuk Akreditasi harus memenuhi dan melengkapi unsur-unsur yang masuk dalam kriteria penilaian, seperti komponen layanan, kerjasama, koleksi, pengolahan bahan pustaka, SDM, gedung/ sarana, anggaran, dan manajemen perpustakaan.

II. Kajian Pustaka

Perpustakaan Nasional RI, sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen, yang bertugas salah satunya membina berbagai jenis perpustakaan di Indonesia, mengamanahkan, bahwa: “ agar jenis perpustakaan khusus dan instansi dapat mengkondisikan perpustakaan dengan syarat minimal sebagai wadah dan pengorganisasian perpustakaan sesuai amanah di dalam Undang-Undang Nomor: 43 Tahun 2007.

Berdasar PP 36 Tahun 2007 perpustakaan adalah sebagai urusan wajib. Lembaga berupaya mewujudkan masyarakat berbasis IPTEK, mengkondisikan adanya masyarakat suka membaca (reading habit); tumbuh menjadi masyarakat belajar (*Learning Society*).

Perpustakaan Nasional RI. Pada acara Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan,

yang dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI bekerjasama dengan Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan, tanggal 17 Oktober 2013, melalui Kepala Deputy Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Woro Titi Haryanti, beserta nara sumber Bambang Supriyono Utomo dan Nurcahyono, mengemukakan, bahwa: "Posisi perpustakaan strategis". Berdasar PP 36 Tahun 2007 perpustakaan sebagai urusan wajib. Undang-Undang Nomor: 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, pasal 4. bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada Pemustaka (pengguna perpustakaan), meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Meningkatkan motivasi lembaga perpustakaan, maka setiap lembaga/institusi perpustakaan pemerintah (jenis Perpustakaan khusus/ instansi) harus juga di Akreditasi".

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode Deskriptif kualitatif. Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Yang merupakan studi korelasi yang menghubungkan manajemen perpustakaan yang sesuai standarisasi dengan persiapan akreditasi.

IV. PEMBAHASAN AKREDITASI BIDANG PERPUSTAKAAN

A. Akreditasi Perpustakaan

Posisi perpustakaan strategis. Berdasar PP 36 Tahun 2007 perpustakaan sebagai urusan wajib. Dalam UU no. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, pasal 4. bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada Pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Meningkatkan motivasi lembaga perpustakaan, maka setiap lembaga/institusi perpustakaan pemerintah (jenis Perpustakaan khusus/ instansi) harus juga di Akreditasi. Adapun untuk mengkondisikan hal-hal sebagaimana telah dikemukakan terdahulu, dalam Akreditasi harus mempersiapkan dan melengkapi unsur-unsur yang masuk dalam kriteria penilaian, seperti komponen layanan, kerjasama, koleksi, pengolahan bahan pustaka, SDM, gedung/ sarana, anggaran, dan manajemen perpustakaan. Pustakawan selaku unsur sumber daya manusia, harus mengorganisir unsur layanan, kerjasama, koleksi, pengolahan bahan pustaka, gedung/ sarana, anggaran, dan manajemen perpustakaan berupaya mewujudkan masyarakat belajar (*Learning Society*); Disini peranan perpustakaan sangat strategis. Namun diharapkan perhatian pemerintahan-pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten/ kota,

sangat besar karena terkait komponen anggaran.

Lembaga Perpustakaan harus mengkondisikan dan melengkapi komponen-komponen yang harus ada dalam suatu perpustakaan, banyak hal yang harus dilakukan seperti:

1. Pembinaan koleksi perpustakaan

Pembinaan koleksi mencakup koleksi cetak, non cetak. Mulai dari seleksi, pengadaan, pemesanan, yang didasarkan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, tujuan perpustakaan serta kepentingan masyarakat pengguna/ pemustaka. Pemilihan bahan pustaka 40 % fiksi dan 60 % non fiksi. Gunakan pedoman pemilihan dan pengadaan buku perpustakaan. Penting pembinaan koleksi, menyediakan koleksi utama perpustakaan berupa buku. Tersedianya informasi yang termuat dalam bentuk lain, seperti majalah, surat kabar, glet dan sejenisnya. ington surat kabar dan majalah, audio visual, poster, pamflet. Koleksi bahan pustaka harus dibina secara terus menerus agar dapat merangsang masyarakat untuk selalu belajar sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mewujudkan masyarakat berbasis IPTEK.

2. Pengorganisasian

Penempatan buku pada lokasi yang paling sesuai dengan

pemakai Sehingga buku dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Membagi koleksi berdasarkan subyek. Semua bentuk dokumen mengenai sebuah subyek dapat dikumpulkan menjadi satu. Di masyarakat Bahan pustaka (saran/ usulan dari masyarakat pengguna perpustakaan. Dalam pelaksanaan seleksi masukkan dari anggota, sesuai kebutuhan masyarakat pengguna, pemilihan buku (penyusunan slip) dilakukan oleh pustakawan atau pakar subyek, pemesanan buku.

3. Pengadaan

Dalam pengadaan, persiapkan anggaran, keragaman pemakai, perkembangan jumlah buku dan majalah yang diterbitkan. Berkembangnya ilmu pengetahuan dengan akibat timbulnya spesialisasi. Tumbuhnya ilmu-ilmu baru dengan produk informasinya yang memaksa pustakawan harus memeras keringat untuk melaksanakan pemilihan buku. Alat bantu seleksi, dan membuat slip buku. Pengadaan bahan pustaka melalui pembelian, hadiah, tukar menukar, alih media, dan atau membuat sendiri. Alat seleksi bahan pustaka, seperti jenis alat seleksi katalog penerbit terbaru, daftar

tambahan koleksi dll. Fungsi alat seleksi bahan pustaka yang tepat, sesuai kebutuhan pemakai. Prosedur pemesanan.

4. Pemeliharaan dan pelestarian bahan pustaka

Dalam UNDANG-UNDANG NO. 43 TAHUN 2007, Bab. II Pasal 6 Kewajiban Masyarakat. Menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan. Menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan Nasional. Menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungan kelembagaan perpustakaan. Pemeliharaan dan pelestarian bahan pustaka. *Preservation* atau pelestarian mencakup semua aspek usaha melestarikan bahan pustaka dan arsip. Termasuk di dalamnya kebijakan pengelolaan keuangan, SDM-nya, metode dan teknik penyimpanannya. *Conservation* atau pengawetan terbatas pada kebijakan serta cara khusus dalam melindungi bahan pustaka untuk kelestarian koleksi. *Restoration* atau pemugaran mengacu pada pertimbangan serta cara yang digunakan untuk memperbaiki bahan pustaka yang rusak.

5. Prinsip-prinsip

Aspek bahan pustaka tujuan,

cakupan dan kelompok pembacanya, tingkat kesulitan, otoritas, kejujuran dan kredibilitas pengarang/ penerbit, subyek buku, perbandingan, tahun terbit, format, harga, tuntutan pembaca. Aspek penyeleksi : memiliki pengetahuan tentang subyek, mengetahui keadaan pemakai, memahami pengetahuan ttg koleksi, menguasai sarana bibliografi yang tersedia, mengetahui dunia penerbitan.

B. Persiapan Akreditasi

Posisi perpustakaan strategis. Berdasar PP 36 Tahun 2007 perpustakaan sebagai urusan wajib. UU no. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan, pasal 4. bahwa perpustakaan bertujuan memberikan layanan kepada Pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Meningkatkan motivasi lembaga perpustakaan, maka setiap lembaga/institusi perpustakaan pemerintah (jenis Perpustakaan khusus/ instansi) harus juga di Akreditasi. Dengan mempersiapkan dan melengkapi unsur-unsur yang masuk dalam kriteria penilaian, seperti berikut ini: 1. Komponen layanan (jam buka, jam tutup, promosi, kerjasama dengan lembaga-lembaga informasi lainnya, seluruh Indonesia yang sudah terakreditasi; 2. Koleksi (minimal 1000 judul, SK MENPAN 132 Tahun 2007, koleksi referensi, koleksi khusus 40 %, lainnya 60 %) ; 3. Pengolahan bahan

pustaka (selesi bahan pustaka); 4. Sistem temu kembali informasi (teknologi elektronik); 5. Sumber Daya Manusia (minimal 4 orang) dalam struktur organisasi termasuk kepala yang duduk dalam jabatan organisasi, status tenaga, jenjang pendidikan formal, dan diklat perpustakaan); 6. Gedung/ ruang/ sarana (gedung, ruang khusus: baca, pengolahan, referensi); (Sarana: kelengkapan rak, meja baca, meja pengolahan, meja petugas, counter layanan, locker penitipan tas dan lain sebagainya); 7. Anggaran (5 % dari bidang yang membawahi perpustakaan); 8. Manajemen perpustakaan (kelembagaan perpustakaan, SK perpustakaan, program, laporan kinerja); 9. Perawatan koleksi perpustakaan (pembasmian serangga).

C. Penentuan (nilai bobot) Akreditasi sertifikasi

Nilai bobot akreditasi sertifikasi perpustakaan memiliki range penilaian sebagai berikut:

NILAI	PREDIKAT PENUH
86 - 100	AKREDITASI A (AMAT BAIK)
71 - 85	AKREDITASI B (BAIK)

56 - 70	AKREDITASI C (CUKUP)
s.d. 55	BELUM TERAKREDITASI

D. Prosedur Akreditasi

Adapun mekanisme akreditasi dapat dilakukan dengan konsep sebagai berikut: 1. Apabila telah memenuhi komponen-komponen sebagaimana arahan ataupun penjelasan terdahulu, dan organisasi sudah siap untuk di Akreditasi, lanjutkan dengan pengusulan dari organisasi perpustakaan yang bersangkutan; 2. Dapat diusulkan ke Perpustakaan Nasional, dengan syarat perpustakaan sudah dilakukan pengelolaan secara baik, menurut standar yang berlaku, memenuhi penilaian administrasi komponen akreditasi; 3. Balasan surat akan dijawab, apakah harus dilengkapi kekurangan atau sudah dapat dilakukan tinjauan lapangan mencocokkan fakta dan data di lapangan; 4. Selanjutnya oleh Perpustakaan Nasional akan dinilai administrasi, untuk ditindak lanjuti jika sudah memenuhi unsur sesuai komponen perpustakaan, dan menurunkan tim untuk meninjau lokasi klarifikasi fakta dan data administrasi. Dilanjutkan dengan penilaian dan penentuan nilai – bobot akreditasi.

III. PENUTUP.

A. Simpulan

1. Keberadaan lembaga perpustakaan khusus harus memenuhi komponen:

Layanan, kerjasama, koleksi, pengolahan bahan pustaka, sdm, gedung/ sarana, anggaran, dan manajemen perpustakaan.

2. Setiap lembaga perpustakaan sesuai jenisnya, akan dilakukan "Profiling", (Akreditasi Perpustakaan).

B. Saran

1. Lembaga perpustakaan yang berada di bawah Pemerintah Daerah seperti Provinsi/ Kabupaten/ Kota, dimana setiap lembaga/ institusi perpustakaan pemerintah (jenis Perpustakaan khusus/ instansi) harus juga di Akreditasi, untuk mengkondisikan dengan melengkapi unsur-unsur yang masuk dalam kriteria penilaian, memenuhi komponen-komponen yang harus dilengkapi dan masih sangat perlu dibenahi agar memenuhi syarat administrasi dari seluruh komponen layanan, kerjasama, koleksi, pengolahan bahan pustaka, sdm, gedung/ sarana, anggaran, dan manajemen perpustakaan.
2. Lembaga perpustakaan yang berada di bawah Pemerintah Daerah seperti Provinsi/ Kabupaten/ Kota, lembaga/institusi perpustakaan pemerintah (jenis Perpustakaan khusus/ instansi) untuk melakukan koordinasi dengan Lembaga Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan Khususnya kepada Badan Perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan sesuai Tugas Pokok Fungsinya salah satunya sebagai pembina berbagai jenis perpustakaan yang ada di wilayah Sumatera Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang No. 43 tahun 2007 tentang perpustakaan; Peraturan Pemerintah 36 Tahun 2007, tentang perangkat Daerah (kedudukan strategis perpustakaan urusan wajib)
- Makalah Sosialisasi Akreditasi Perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI bekerjasama dengan Badan Perpustakaan Prov. Sumsel , Sumatera Selatan: Palembang 17 Oktober 2013.
- Witley, F.1960.The Elemen of Research.New York:Prestice-Hall,Inc.